

Judul : Insentif ramadhan-lebaran, komisi XI optimistis konsumsi meningkat
Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Insentif Ramadan-Lebaran Komisi XI Optimistis Konsumsi Meningkat

FOTO: DPR.GO.ID



Anis Byarwati

ANGGOTA Komisi XI DPR Anis Byarwati menilai insentif Ramadan-Lebaran sebesar Rp 12,8 triliun sebagai langkah yang tepat. Ramadan dan Lebaran bukan hanya momentum ibadah, tetapi juga momentum ekonomi yang setiap tahun mendorong peningkatan konsumsi dan perputaran uang di berbagai daerah.

Diketahui, insentif Rp 12,8 triliun itu digelontorkan dalam bentuk bantuan pangan, dukungan transportasi mudik, serta penerapan kebijakan *Work From Anywhere* (WFA) bagi ASN dan pekerja. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat meningkatkan perputaran uang, konsumsi, dan aktivitas ekonomi di daerah.

"Jadi wajar jika pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp 12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi," ujar Anis dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Anis menilai, kebijakan itu sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan dan meningkatnya kebutuhan selama Ramadan. Kendati demikian, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti sebagai program musiman tanpa evaluasi menyeluruh.

"Kami mendukung langkah

yang meringankan beban rakyat. Namun, kami juga akan memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif dan tidak sekadar menjadi kebijakan musiman tanpa evaluasi," tegas politikus PKS itu.

Terkait ketepatan sasaran, Anis menekankan pentingnya akurasi data dan kualitas distribusi bantuan. Pasalnya, persoalan klasik bantuan sosial kerap terletak pada implementasi di lapangan. Jangan sampai pihak yang berhak justru terlewat, sementara yang tidak berhak malah menerima bantuan. Kuncinya bukan hanya pada niat baik, melainkan pada kualitas eksekusi.

Dari sisi daya beli, Anis mengakui, stimulus tersebut berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek. Ketika beban belanja pangan berkurang, masyarakat memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan lainnya sehingga turut menggerakkan ekonomi lokal. Namun, dampak kebijakan ini bersifat sementara.

"Kita harus jujur, dampaknya bersifat sementara. Daya beli yang kuat tetap harus ditopang oleh lapangan kerja dan pendapatan yang stabil," jelasnya.

Terkait WFA, Anis menilai, langkah itu dapat menjadi strategi cerdas untuk mengurangi kepadatan arus mudik sekaligus memperpanjang perputaran ekonomi di daerah. Kebijakan ini berpotensi memperpanjang waktu tinggal masyarakat di kampung halaman, sehingga ekonomi daerah bergerak lebih lama.

"Namun, fleksibilitas kerja jangan sampai menurunkan kualitas pelayanan publik. Produktivitas ASN dan pelayanan publik harus tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tetapi pelayanan menjadi lambat," katanya. ■ **PYB**